



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

KAPUAS HULU!
SEMAKIN NEBAT!

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

GEDUNG PELAYANAN SATU ATAP
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU



Perubahan RENCANA KERJA

**TAHUN
2026**



<https://setda.kapuashulukab.go.id/renja>

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU



KATA PENGANTAR

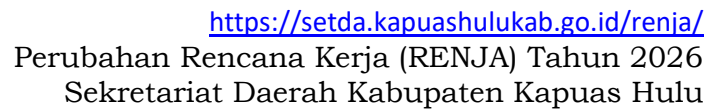
Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2026 ini.

Rencana Kerja (RENJA) adalah proses perencanaan program dan kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun 2026 dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) periode 2025-2029 serta hasil evaluasi dari pihak evaluator. Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dituangkan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Perjanjian Kinerja (PK) dan selanjutnya dilakukan pengukuran atas pencapaian kinerja. Hal ini dimaksudkan agar Sekretariat Daerah dapat melaksanakan Program dan Kegiatan sehingga sasaran Strategis dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) ini setiap OPD dapat diukur keberhasilan atau kinerjanya dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja dan anggaran yang telah direncanakan. Hal ini juga menjadi tolak ukur keberhasilan OPD dalam melaksanakan kinerjanya sesuai tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Dalam Rencana Kerja (Renja) ini akan disajikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sebelumnya, analisis kinerja, review terhadap Renja sebelum perubahan, usulan dari masyarakat dan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah yang akan dicapai pada tahun bersangkutan dan target perkiraan maju pada tahun berikutnya. Kami berharap dengan adanya Rencana Kerja (Renja) ini Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan.

Kami menyadari dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini masih banyak kekurangan, untuk itu kami mohon masukan dan saran serta perbaikan dari atasan dan lembaga pengawasan untuk penyempurnaan



Putussibau, 25 Mei 2026

Ambrosius Sadau





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR LAMPIRAN	V
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II.....	6
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2026.....	6
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2026 DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH	6
1.1.1. <i>Sasaran Renstra baru 2025-2029.....</i>	11
1.1.2. <i>Target Tahun 2026 terdapat perubahan</i>	12
1.1.3. <i>Jumlah Penerima Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Secara Elektronik.....</i>	13
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	15
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 18	
2.4 REVIEW TERHADAP RENJA 2026 SEBELUM PERUBAHAN	19
BAB III.....	31
TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH.....	31
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	31
3.2 TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH	31
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	35
BAB IV	39
PENUTUP	39



DAFTAR TABEL

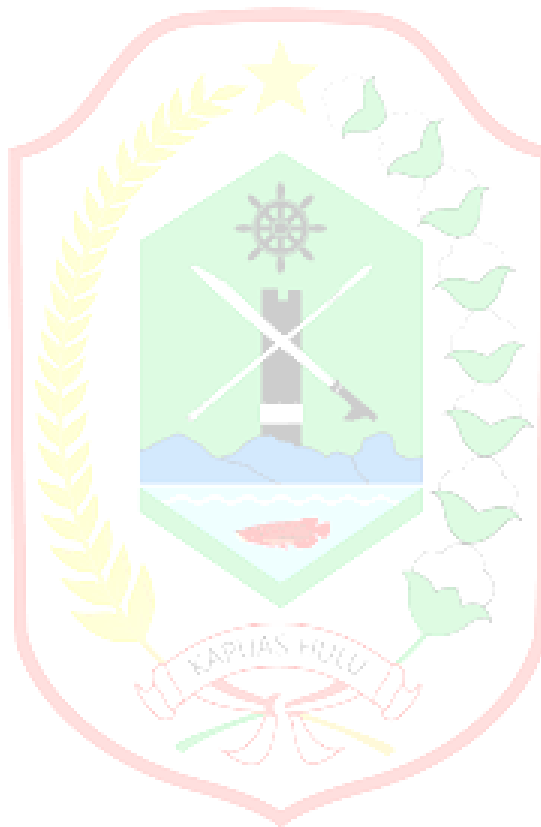
Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD	7
Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD	15
Tabel 3 Review Terhadap Renja 2026 (Sebelum Perubahan)	20
Tabel 4 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	34
Tabel 5 Program dan Kegiatan dan Target Capaian Kinerja Renja	35





DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Daftar Dokumen SAKIP Sekretariat Daerah.....	41
LAMPIRAN 2 Evaluasi Hasil Renja Tahun 2026 Triwulan I.....	43
LAMPIRAN 3 Matrik Rencana Kerja Perangkat Daerah Sebelum Dan Sesudah Perubahan Beserta.....	44





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.



Renja yang disusun akan menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan OPD sesuai dengan Tupoksinya. Penyusunan Renja ini nantinya akan menjadi tolak ukur dalam pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kerja (Renja) yang disusun oleh OPD memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen lainnya. Penyusunan Renja ini mengacu kepada hasil pengukuran dan evaluasi kinerja sebelumnya sehingga yang menjadi masalah pada Renja sebelumnya tidak terjadi kembali pada Renja yang akan datang.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah menjadi bahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). RKPD yang disusun akan dijadikan Pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang selanjutnya akan disusun menjadi Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD). APBD inilah yang nantinya akan menjadi panduan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah.

Selanjutnya setelah dokumen Anggaran telah ditetapkan akan dibuat Perjanjian Kinerja yang selanjutnya akan diukur dan hasil capaian kinerja akan menjadi bahan evaluasi untuk kemudian dilakukan perbaikan terhadap permasalahan tersebut.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 107 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
11. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 22/SETDA/PERKEU/2025 tentang Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
12. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 000.7.2.4/1652/BAPPERIDA/PPEPD Tanggal 12 Mei 2026 perihal



Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 pada dasarnya bertujuan untuk menyediakan dokumen sekaligus rujukan utama sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Sekretariat Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026. Penyusunan RAPBD dilaksanakan secara partisipatif melalui rangkaian program Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Disamping itu, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu juga dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya cita-cita pembangunan daerah, terutama demi terlaksananya pembangunan secara menyeluruh dan merata bagi masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, melalui perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, bertahap, efektif, aspiratif, partisipatif serta berkesinambungan seiring terwujudnya kerangka pembangunan daerah yang kokoh, tangguh dan mandiri sebagaimana yang diamanatkan dalam visi dan misi Kabupaten Kapuas Hulu.

Sejalan dengan fungsi dan cakupan pokok dokumen Rencana Kerja (Renja) yang pada hakekatnya merupakan komitmen Sekretariat Daerah serta memuat seluruh kebijakan dan arah kebijakan pembangunan dalam masa satu tahunan, maka secara garis besar, Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2026 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk dapat digunakan sebagai instrumen dalam mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja.
2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;



3. Sebagai acuan dalam menuangkan Program/Kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
4. Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah kedalam Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah.
5. Sebagai patokan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran kinerja serta Evaluasi Kinerja.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk dapat menggambarkan dan menguraikan secara sistematis arah kebijakan prioritas pembangunan dan wujud masa depan yang diinginkan dan diperjuangkan, maka materi Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2026 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan dipaparkan tentang Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud Dan Tujuan; dan Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2026

Pada Bab ini akan dipaparkan Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Capaian Renstra OPD; Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Capaian Renstra OPD; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD; Review terhadap Renja.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

Pada Bab ini akan dipaparkan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi; Tujuan dan sasaran Renja OPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

Pada Bab ini akan dipaparkan Rencana Kerja dan Pendanaan dalam bentuk program dan kegiatan Sekretariat Daerah.

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari pembuatan Renja Sekretariat Daerah.



BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2026

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Triwulan I Tahun 2026 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026. Evaluasi tersebut dilakukan melalui pengukuran kinerja yang dilakukan sampai dengan triwulan I berdasarkan target kinerja pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2026 yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan Target Akhir Renstra, Realisasi 2025 serta prakiraan capaian tahun 2026.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja dan kendala yang dihadapi serta solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2026, seperti pada tabel berikut ini:



Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD

Program/ Kegiatan	Indikator	Target Akhir Renstra 2029	Realisasi 2024	Target dan Realisasi 2025 (N-1)			2026 (N)				Ket
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Satuan	Realisasi s/d Tw 1	Capaian %	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	100	-	95,00	100,00	105,26	96,00	%	70,00	72,92	-
	Persentase kebijakan strategis dibidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	95	-	95,00	100,00	105,26	95,00	%	18,18	19,14	-
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan	95	-	19	19,00	100,00	21	Dok	9	42,86	-
Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase penyelesaian administrasi batas antar wilayah Kecamatan dan Kelurahan	72	-	68,00	69,44	102,12	100,00	%	0,00	0,00	-
	Persentase Pemutakhiran Data Rupabumi	90	87	78	73,91	94,76	100,00	%	0,00	0,00	-
	Persentase Jumlah Urusan pada OPD yang Menyusun LPPD sesuai petunjuk	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	%	100,00	100,00	-
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	55	-	11	11	100,00	10	Kebijakan	2	20,00	-
	Jumlah rumusan Kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial yang terlaksana	5	-	1	1	100,00	1	Kebijakan	0	0,00	-
	Jumlah Rumusan Kebijakan Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang terlaksana	20	-	4	4	100,00	0	Kebijakan	0	0,00	-
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase penyelesaian Proses Penyusunan produk hukum	90	82	82,00	105,09	128,16	83,00	%	20,67	24,90	-
	Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum	90	87	77,00	84,62	109,89	80,00	%	20,00	25,00	-



Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Program/ Kegiatan	Indikator	Target Akhir Renstra 2029	Realisasi 2024	Target dan Realisasi 2025 (N-1)			2026 (N)				Ket
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Satuan	Realisasi s/d Tw 1	Capaian %	
	Persentase Publikasi dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	100	50	100,00	90,67	90,67	100,00	%	21,33	21,33	-
Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Wajib Daerah	100	91	100,00	100,00	100,00	100,00	%	0,00	0,00	-
Meningkatnya Kualitas Kebijakan diBidang Perekonomian dan SDA	Persentase kebijakan strategis dibidang Perekonomian dan SDA yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	%	30,00	30,00	-
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Perekonomian, Pembangunan, SDA dan PBJ yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan	95	100	19	19	100,00	10	Dok	3	30,00	-
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase kebijakan perekonomian yang di tindaklanjuti	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	%	0,00	0,00	-
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase kebijakan Administrasi Pembangunan yang di tindaklanjuti	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	%	0,00	0,00	-
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase capaian layanan pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan tender/seleksi dan e-purchasing	100	-	100,00	39,19	39,19	100,00	%	0,00	0,00	-
	Jumlah Penerima Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik	1050	50	210	223	106,19	4	Dokumen	54	1350,00	-
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang di tindaklanjuti	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	%	0,00	0,00	-
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	80	60,4	67,50	67,50	100,00	70,00	Nilai	67,50	96,43	-
Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Administrasi Umum	Persentase kebijakan strategis dibidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	100	-	100,00	100,00	100,00	100,00	%	25,71	25,71	-
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	88	87,78	84,00	85,90	102,26	85,00	Nilai	85,90	101,06	-



Program/ Kegiatan	Indikator	Target Akhir Renstra 2029	Realisasi 2024	Target dan Realisasi 2025 (N-1)			2026 (N)				Ket
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Satuan	Realisasi s/d Tw 1	Capaian %	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan	151	-	33	33	100,00	35	Dok	9	25,71	-
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, dokumen Penganggaran dan Laporan Kinerja yang sesuai dengan pedoman teknis	100	92	100,00	100,00	100,00	100,00	%	47,37	47,37	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan sesuai Pedoman yang Berlaku	100	-	100,00	100,00	100,00	100,00	%	27,27	27,27	-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	95	100	95,00	100,00	105,26	95,00	%	0,00	0,00	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang sesuai dengan pedoman berlaku	90	-	90,00	100,00	111,11	90,00	%	10,81	12,01	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum yang terpenuhi	100	100	100,00	19,60	19,60	100,00	%	24,14	24,14	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terakomodir	100	100	100,00	7,22	7,22	100,00	%	0,00	0,00	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	%	12,50	12,50	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100	-	100,00	100,00	100,00	100,00	%	7,55	7,55	-
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah	100	100	100,00	92,31	92,31	100,00	%	30,00	30,00	-
Penataan Organisasi	Jumlah Kelembagaan Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	3	-	1	1	100,00	26	PD	2	7,69	-
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan	5	-	1	1	100,00	6	Dok	0	0,00	-
	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menetapkan Standar Pelayanan Publik	46	7	6	6	100,00	15	PD	3	20,00	-



Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Program/ Kegiatan	Indikator	Target Akhir Renstra 2029	Realisasi 2024	Target dan Realisasi 2025 (N-1)			2026 (N)				Ket
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Satuan	Realisasi s/d Tw 1	Capaian %	
	Jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Reformasi Birokrasi	8	6	6	8	133,33	8	PD	8	100,00	-
	Jumlah Perangkat Daerah dengan Predikat AKIP Minimal B sesuai Hasil Evaluasi Tim APIP dari Perangkat Daerah yang dievaluasi	26	-	22	23	104,55	25	PD	0	0,00	-
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Layanan Keprotokolan Pimpinan	86	-	81,00	100,00	123,46	100,00	%	27,78	27,78	-
	Persentase Layanan Komunikasi Pimpinan	85	-	82,00	102,35	124,82	100,00	%	23,08	23,08	-
	Persentase Pendokumentasian Tugas Pimpinan	90	-	86,00	101,15	117,62	100,00	%	28,57	28,57	-

Sumber: <https://setda.kapuashulukab.go.id/pengisian-data-kinerja/>

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 sampai dengan Triwulan I pada Tabel diatas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :



1.1.1.1. Sasaran Renstra baru 2025-2029

Dengan telah ditetapkan RPJMD 2025-2029 Kabupaten Kapuas Hulu maka Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah menyusun Renstra baru yang mengacu kepada RPJMD 2025-2029 Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga terdapat beberapa indikator baru yang tentunya tidak terdapat pada Renstra yang terdahulu, maka capaian atau base line untuk Tahun 2024 beberapa tidak memiliki data capaian.

Pada Renstra lama indikator kinerja utama (IKU) hanya terdapat tiga sasaran saja yaitu terkait SAKIP, LPPD dan IKM saja. Sedangkan pada Renstra yang baru ini terdapat 5 sasaran dan 6 indikatornya, dengan 2 indikator lama masih tetap digunakan dan 1 indikator terkait LPPD sudah tidak digunakan lagi.

Alasan tidak menggunakan indikator LPPD tersebut karena karena trend penilaiannya tidak setiap tahun dikeluarkan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri sehingga apabila tetap menggunakan indikator tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan rendahnya capaian terkait indikator tersebut. Penilaian terhadap LPPD terakhir dikeluarkan pada tahun 2024 dengan nilai 2,8143.

Berdasarkan hasil evaluasi internal pada triwulan IV tahun 2024 yang dilaksanakan pada 4 Februari 2025 salah satu yang menjadi bahan evaluasi yaitu sasaran strategis pada IKU yang lama tidak mencakup beberapa asisten dibawahnya atau beberapa program tertentu dibawahnya. Secara tersistem seharusnya IKU merupakan indikator yang selanjutnya akan dijabarkan melalui indikator dibawahnya seperti indikator asisten dan kepala bagian. Namun ketiga indikator pada IKU lama tidak mengakomodir pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan.



Pada Renstra terbaru tersebut diupayakan agar keterkaitan indikator diatas dan dibawahnya harus memiliki ketergantungan, serta keselarasan IKU pada target dan tujuan pada RPJMD 2025-2029.

Alasan Penggunaan 4 Indikator baru (Kebijakan):

- Penyelarasan dengan RPJMD baru Sasaran RPJMD periode 2025-2029 memiliki irisan atau crosscutting kinerja yang merupakan salah satu tanggung jawab dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sehingga perlu melakukan penetapan indikator diluar IKU yang lama;
- Mengakomodasi Tugas Pokok Asisten Apabila melakukan pengcascadingan menggunakan Indikator yang terdahulu maka dapat dilihat bahwa ketiga indikator tersebut tidak mengakomodir tugas pokok asisten di bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian Pembangunan SDA; *(telah dibahas pada laporan monev Tw 1 2025 halaman 4 dan 10) dan (Monev Tw 4 2025 halaman 2)*

1.1.2. Target Tahun 2026 terdapat perubahan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi yang dilakukan secara rutin setiap triwulan, maka diperoleh capaian yang diperkirakan sampai dengan akhir tahun tidak akan tercapai dan juga terdapat yang akan melebihi target. Dengan melihat kondisi tersebut, maka berdasarkan hasil analisis proyeksi tersebut maka perlu dilakukan perubahan terhadap target tersebut, yang artinya target baru tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan target yang terdapat pada dokumen Renstra sehingga perlu kedepannya melakukan evaluasi kembali apakah Renstra perlu dilakukan revisi.



1.1.3. Jumlah Penerima Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik

Sampai dengan triwulan I Tahun 2026 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melakukan evaluasi terhadap target capaian beserta satuan target kinerja yang semula menggunakan jumlah penerima, namun dari hasil evaluasi digantikan dengan dokumen yang berarti jumlah penerimaan layanan dapat dilihat dari dokumen yang akan dilaporkan setiap 3 Bulan.

Berdasarkan dari seluruh permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka diuraikan secara umum penyebab beserta solusi untuk pemecahan terhadap masalahnya:

1. Secara umum permasalahan tersebut diatas yaitu begitu sulitnya menentukan target untuk satu tahun. Menentukan target kinerja agar tercapai dapat dilakukan dengan metode SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*), yaitu memastikan target jelas, terukur angkanya, realistis, relevan dengan tujuan organisasi, dan memiliki tenggat waktu. Langkah kuncinya meliputi berkolaborasi dengan tim, memantau data secara berkala, dan mengevaluasi kinerja secara rutin untuk penyesuaian.
2. Penentuan target juga harus berdasarkan tren minimal data untuk 3 tahun terakhir. Namun apabila menarik data dari 3 tahun kebelakang maka Sekretariat Daerah hanya memiliki data untuk tahun 2025 saja sedangkan untuk data 2024 dst merupakan data kinerja yang tidak terukur atau tidak memiliki dokumen kelengkapan seperti bukti dukung yang cukup akurat. Maka dari itu tetap perlu melakukan penelusuran secara mendalam dan menyeluruh terhadap bukti dukung.
3. Pada Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan pengukuran kinerja dengan melakukan penelusuran terhadap bukti dukung serta melakukan validasi terhadap kesesuaian bukti dukung dengan indikatornya. Dengan melakukan



penelusuran terhadap bukti dukung maka begitu banyak ditemukan target yang tidak tercapai serta melebihi target. Upaya yang akan dilakukan yaitu kembali melakukan evaluasi untuk kemudian menetapkan kembali target yang sesuai.

4. Diupayakan untuk Tahun 2026 ini akan menentukan target berdasarkan tahun terakhir yaitu tahun 2025 saja. Namun data yang dibutuhkan sebenarnya 3 tahun terakhir agar capaian nantinya tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi.
5. Sekretariat Daerah menetapkan Range batas minimal dan maksimal yaitu minimal persentase capaian kinerja sebesar 90% dan maksimal capaian kinerja sebesar 120%.





2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2026 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

Kode	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian				Proyeksi Tahun N (2026)	Catatan Analisis
				2025	2026	2027	2028	2029	Tahun N- 3 (2023)	Tahun N-2 (2024)		Tahun N- 1 (2025)		
										Realisasi	%			
Sasaran 1	Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	-	-	95	96	97	98	100	-	95	105,26	100,00	96	-
Sasaran 1.ind2	Persentase kebijakan strategis dibidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	-	-	95	95	95	95	95	-	95	105,26	100,00	95	-
4.01.02	Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan	-	IKK	19	19	19	19	19	-	19	100,00	19	19	-
4.01.02.2.01	Persentase penyelesaian administrasi batas antar wilayah Kecamatan dan Kelurahan	-	-	68	68	69	70	72	-	68	102,12	69,44	68	-
4.01.02.2.01.ind2	Persentase Pemutakhiran Data Rupabumi	-	-	78	78	80	83	90	-	78	94,76	73,91	78	-
4.01.02.2.01.ind3	Persentase Jumlah Urusan pada OPD yang Menyusun LPPD sesuai petunjuk	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100,00	100,00	100	-
4.01.02.2.02	Jumlah rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	-	-	11	11	11	11	11	-	11	100,00	11	11	-
4.01.02.2.02.ind2	Jumlah rumusan Kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial yang terlaksana	-	-	1	1	1	1	1	-	1	100,00	1	1	-
4.01.02.2.02.ind3	Jumlah Rumusan Kebijakan Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang terlaksana	-	-	4	4	4	4	4	-	4	100,00	4	4	-
4.01.02.2.03	Persentase penyelesaian Proses Penyusunan produk hukum	-	-	82	83	85	88	90	-	82	128,16	105,09	83	-
4.01.02.2.03.ind2	Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum	-	-	77	80	85	88	90	-	77	109,89	84,62	80	-
4.01.02.2.03.ind3	Persentase Publikasi dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	-	-	100	100	100	100	100	-	100	90,67	90,67	100	-
4.01.02.2.04	Persentase Kerjasama Wajib Daerah	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100,00	100,00	100	-



Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Kode	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Tahun N- 3 (2023)	Realisasi Capaian		Tahun N- 1 (2025)	Proyeksi Tahun N (2026)	Catatan Analisis
				2025	2026	2027	2028	2029		Tahun N-2 (2024)	%			
Sasaran 2	Persentase kebijakan strategis dibidang Perekonomian dan SDA yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100,00	100,00	100	-
4.01.03	Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Perekonomian, Pembangunan, SDA dan PBJ yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan	-	IKK	19	19	19	19	19	-	19	100,00	19	19	-
4.01.03.2.01	Persentase kebijakan perekonomian yang di tindaklanjuti	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100,00	100,00	100	-
4.01.03.2.02	Persentase kebijakan Administrasi Pembangunan yang di tindaklanjuti	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100,00	100,00	100	-
4.01.03.2.03	Persentase capaian layanan pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan tender/seleksi dan e-purchasing	-	-	100	100	100	100	100	-	100	39,19	39,19	100	-
4.01.03.2.03.ind2	Jumlah Penerima Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik	-	-	210	210	210	210	210	-	210	106,19	223	210	-
4.01.03.2.04	Persentase rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang di tindaklanjuti	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100,00	100,00	100	-
Sasaran 3	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	-	-	67,5	70	72,5	75	77,5	B	68	100,00	67,50	70	-
Sasaran 4	Persentase kebijakan strategis dibidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100,00	100,00	100	-
Sasaran 5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	-	-	84	85	86	87	88	-	84	102,26	85,90	85	-
4.01.01	Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan	-	IKK	41	30	30	25	25	-	33	100,00	33	30	-
4.01.01.2.01	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, dokumen Penganggaran dan Laporan Kinerja yang sesuai dengan pedoman teknis	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100,00	100,00	100	-
4.01.01.2.02	Persentase Administrasi Keuangan sesuai Pedoman yang Berlaku	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100,00	100,00	100	-
4.01.01.2.03	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	-	-	95	95	95	95	95	-	95	105,26	100,00	95	-
4.01.01.2.05	Persentase Administrasi Kepegawaian yang sesuai dengan pedoman berlaku	-	-	90	90	90	90	90	-	90	111,11	100,00	90	-
4.01.01.2.06	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum yang terpenuhi	-	-	100	100	100	100	100	-	100	19,60	19,60	100	-
4.01.01.2.07	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terakomodir	-	-	100	100	100	100	100	-	100	7,22	7,22	100	-
4.01.01.2.08	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100,00	100,00	100	-
4.01.01.2.09	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100,00	100,00	100	-
4.01.01.2.11	Persentase Pelayanan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah	-	-	100	100	100	100	100	-	100	92,31	92,31	100	-
4.01.01.2.13	Jumlah Kelembagaan Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	-	-	1	3	3	3	3	-	1	100,00	1	3	-
4.01.01.2.13.ind2	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan	-	-	1	1	1	1	1	-	1	100,00	1	1	-



Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Kode	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Tahun N- 3 (2023)	Realisasi Capaian		Tahun N- 1 (2025)	Proyeksi Tahun N (2026)	Catatan Analisis
				2025	2026	2027	2028	2029		Tahun N-2 (2024)	%			
4.01.01.2.13.ind3	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menetapkan Standar Pelayanan Publik	-	-	6	10	10	10	10	-	6	100,00	6	10	-
4.01.01.2.13.ind4	Jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Reformasi Birokrasi	-	-	6	8	8	8	8	-	6	133,33	8	8	-
4.01.01.2.13.ind5	Jumlah Perangkat Daerah dengan Predikat AKIP Minimal B sesuai Hasil Evaluasi Tim APIP dari Perangkat Daerah yang dievaluasi	-	-	22	23	24	25	26	-	22	104,55	23	23	-
4.01.01.2.14	Persentase Layanan Keprotokolan Pimpinan	-	-	81	82	83	84	86	-	81	123,46	100,00	82	-
4.01.01.2.14.ind2	Persentase Layanan Komunikasi Pimpinan	-	-	82	83	84	85	85	-	82	124,82	102,35	83	-
4.01.01.2.14.ind3	Persentase Pendokumentasian Tugas Pimpinan	-	-	86	87	88	89	90	-	86	117,62	101,15	87	-

Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Data-Kinerja-SetdaKH-2026>

Berdasarkan tabel diatas ditandai dengan warna kuning dan merah telah dijelaskan dan diuraikan sebelumnya pada halaman **11**.





2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Sekretariat Daerah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membantu tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Administrasi Umum, Pemerintahan, Hukum, Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Pembangunan dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas pimpinan dan wakil pimpinan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Daerah secara teknis membantu kelancaran tugas Pimpinan dan wakil pimpinan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan wakil pimpinan, tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dituntut semakin cepat, tepat serta mampu meletakkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat sebelas (11) isu strategis diprediksi akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Isu strategis tersebut akan digunakan untuk mengantisipasi berbagai masalah yang dihadapi dan untuk memberikan arah bagi perumusan berbagai program kegiatan Sekretariat Daerah pada tahun-tahun mendatang. Adapun Isu strategis yang di hadapi:

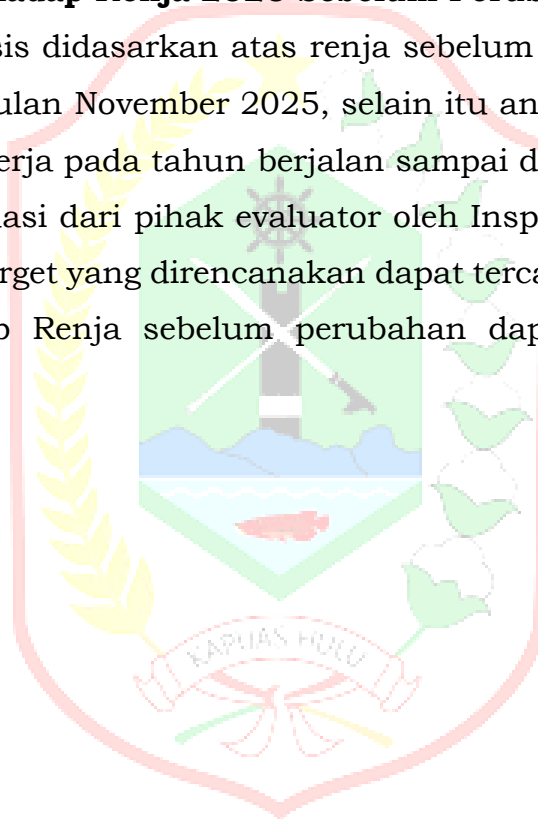
1. Rendahnya penyediaan sarana dan prasarana keagamaan;
2. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik;
3. Belum optimalnya pelaksanaan penataan organisasi;
4. Belum optimalnya pelayanan terhadap Masyarakat;
5. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan terkait pengadaan barang/jasa;
6. Belum optimalnya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian;
7. Rendahnya sarana dan parasaran kantor yang tersedia;



8. Belum optimalnya pengharmonisasian kebijakan;
9. Meningkatnya potensi pergeseran nilai-nilai norma dan kebudayaan masyarakat sebagai dampak media sosial;
10. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkualitas berbasis potensi unggulan yang ramah lingkungan;
11. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Sekretariat Daerah.

2.4 Review Terhadap Renja 2026 Sebelum Perubahan

Hasil analisis didasarkan atas renja sebelum perubahan yang telah disusun pada Bulan November 2025, selain itu analisis didasarkan pada pengukuran kinerja pada tahun berjalan sampai dengan Triwulan I 2026 serta hasil evaluasi dari pihak evaluator oleh Inspektorat dan Bapperida agar nantinya target yang direncanakan dapat tercapai dengan maksimal. Review terhadap Renja sebelum perubahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:





Tabel 3 Review Terhadap Renja 2026 (Sebelum Perubahan)

Kode	Sebelum Perubahan				Hasil Analisis Kebutuhan				Ket.
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	
Sasaran 1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	96	8.726.922.280	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	96	8.726.922.280	IKU
Sasaran 1.ind2		Persentase kebijakan strategis dibidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	95			Persentase kebijakan strategis dibidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	95		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan	19	8.726.922.280	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan	21	8.726.922.280	-
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase peningkatan penyelesaian administrasi batas antar wilayah Kecamatan dan Kelurahan	68	222.236.400	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase penyelesaian administrasi batas antar wilayah Kecamatan dan Kelurahan	100	222.236.400	-
4.01.02.2.01.ind2		Persentase Peningkatan Pemutakhiran Data Rupabumi Kecamatan	78			Persentase Pemutakhiran Data Rupabumi	100		-
4.01.02.2.01.ind3		Persentase Jumlah Urusan pada OPD yang Menyusun LPPD sesuai petunjuk	100			Persentase Jumlah Urusan pada OPD yang Menyusun LPPD sesuai petunjuk	100		-
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintah	1	86.188.600	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintah	4	86.188.600	-
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1	35.402.800	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2	35.402.800	-
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2	100.645.000	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4	100.645.000	-
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	11	8.264.337.600	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	10	8.264.337.600	-
4.01.02.2.02.ind2		Jumlah rumusan Kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial yang terlaksana	1			Jumlah rumusan Kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial yang terlaksana	1		-
4.01.02.2.02.ind3		Jumlah Rumusan Kebijakan Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang terlaksana	4			Jumlah Rumusan Kebijakan Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang terlaksana	0		-
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	11	8.209.384.400	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3	8.209.384.400	-
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan	1	29.637.200	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan,	1	29.637.200	-



Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Kode	Sebelum Perubahan				Hasil Analisis Kebutuhan				Ket.
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	
		Perempuandan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4	25.316.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2	25.316.000	-
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase penyelesaian Proses Penyusunan produk hukum	83	118.084.280	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase penyelesaian Proses Penyusunan produk hukum	83	118.084.280	-
4.01.02.2.03.Ind2		Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum	80			Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum	80		-
4.01.02.2.03.Ind3		Persentase Publikasi dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	100			Persentase Publikasi dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	100		-
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	650	49.295.205	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	550	49.295.205	-
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10	40.260.000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10	40.260.000	-
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	150	28.529.075	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	150	28.529.075	-
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Wajib Daerah	100	122.264.000	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Wajib Daerah	100	122.264.000	-
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10	122.264.000	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	4	122.264.000	-



Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Kode	Sebelum Perubahan				Hasil Analisis Kebutuhan				Ket.
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	
Sasaran 2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan diBidang Perekonomian dan SDA	Persentase kebijakan strategis dibidang Perekonomian dan SDA yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	100	789.648.900	Meningkatnya Kualitas Kebijakan diBidang Perekonomian dan SDA	Persentase kebijakan strategis dibidang Perekonomian dan SDA yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	100	789.648.900	IKU
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Perekonomian, Pembangunan, SDA dan PBJ yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan	19	789.648.900	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Perekonomian, Pembangunan, SDA dan PBJ yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan	10	789.648.900	-
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase kebijakan perekonomian yang di tindaklanjuti	100	61.169.400	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase kebijakan perekonomian yang di tindaklanjuti	100	61.169.400	-
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2	12.234.100	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4	12.234.100	-
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2	12.233.700	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	12.233.700	-
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1	12.234.000	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4	12.234.000	-
4.01.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1	12.233.700	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	4	12.233.700	-
4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1	12.233.900	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	4	12.233.900	-
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase kebijakan Administrasi Pembangunan yang di tindaklanjuti	100	36.749.500	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase kebijakan Administrasi Pembangunan yang di tindaklanjuti	100	36.749.500	-
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1	12.281.600	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Fasilitasi penyusunan program pembangunan	4	12.281.600	-
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi ProgramPembangunan	1	12.234.000	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi ProgramPembangunan	4	12.234.000	-
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	1	12.233.900	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	4	12.233.900	-
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase capaian layanan pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan tender/seleksi dan e-purchasing	100	655.028.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase capaian layanan pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan tender/seleksi dan e-purchasing	100	655.028.000	-
4.01.03.2.03.ind2		Jumlah Penerima Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik	210			Jumlah Penerima Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik	4		-
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	65	401.315.800	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2	401.315.800	-



Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Kode	Sebelum Perubahan				Hasil Analisis Kebutuhan				Ket.
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Pengguna yang mendapatkan layanan Pengadaan barang/jasa secara elektronik	210	184.761.200	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4	184.761.200	-
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	65	68.951.000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	60	68.951.000	-
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang di tindaklanjuti	100	36.702.000	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang di tindaklanjuti	100	36.702.000	-
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1	12.233.900	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Kehutanan, Perikanan	4	12.233.900	-
4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan, Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	1	12.234.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan, Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	4	12.234.000	-
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air	1	12.234.100	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air	4	12.234.100	-
Sasaran 3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	70	33.423.567.820	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	70	33.423.567.820	IKU
Sasaran 4	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Administrasi Umum	Persentase kebijakan strategis dibidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	100		Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Administrasi Umum	Persentase kebijakan strategis dibidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	100		
Sasaran 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	85		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	85		



Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Kode	Sebelum Perubahan				Hasil Analisis Kebutuhan				Ket.
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan	30	33.423.567.820	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan	35	33.423.567.820	-
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, dokumen Penganggaran dan Laporan Kinerja yang sesuai dengan pedoman teknis	100	232.231.313	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, dokumen Penganggaran dan Laporan Kinerja yang sesuai dengan pedoman teknis	100	232.231.313	-
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	119.645.713	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	119.645.713	-
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	15.441.100	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	15.441.100	-
4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	14.414.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	14.414.000	-
4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1	15.639.700	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1	15.639.700	-
4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1	15.333.400	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1	15.333.400	-
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian ki nerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	15.265.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian ki nerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	15.265.200	-
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	4	32.486.600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	4	32.486.600	-
4.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	4.005.600	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	4.005.600	-
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan sesuai Pedoman yang Berlaku	100	19.464.041.075	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan sesuai Pedoman yang Berlaku	100	19.464.041.075	-
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan Penerimaan gaji dan tunjangan ASN	12	18.792.571.200	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3234	18.792.571.200	-



Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

BerAKHLAK 25



Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Kode	Sebelum Perubahan				Hasil Analisis Kebutuhan				Ket.
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	50.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	50.000.000	-
4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	12	24.999.329	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	12	24.999.329	-
4.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	16.980.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3	16.980.000	-
4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	14.516.500	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	14.516.500	-
4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	2.200.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	2.200.000	-
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum yang terpenuhi	100	5.639.347.962	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum yang terpenuhi	100	5.639.347.962	-
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	49.800.400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	49.800.400	-
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	1.365.900	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	1.365.900	-
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1.345.900	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1.345.900	-
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	125.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	125.000.000	-
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	25.963.262	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	25.963.262	-
4.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	30	2.046.203.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	2.046.203.000	-
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500	3.359.670.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	3.359.670.000	-
4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	29.999.500	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	29.999.500	-
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terakomodir	100	24.321.889	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terakomodir	100	24.321.889	-
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	22.999.789	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	22.999.789	-
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang tersedia	650	1.322.100	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang tersedia	1	1.322.100	-
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100	3.657.096.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100	3.657.096.000	-



Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Kode	Sebelum Perubahan				Hasil Analisis Kebutuhan				Ket.
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5053	696.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	696.000	-
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	2.680.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	2.680.000.000	-
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	250.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	250.000.000	-
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	726.400.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	726.400.000	-
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100	1.154.991.600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100	1.154.991.600	-
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39	480.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39	480.000.000	-
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	374.991.600	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	374.991.600	-
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	300.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	300.000.000	-
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah	100	669.671.000	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah	100	669.671.000	-
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Layanan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	207.831.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28	207.831.000	-
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Layanan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	7	61.740.000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	61.740.000	-
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Layanan Pembayaran Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	400.100.000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	400.100.000	-
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Kelembagaan Kabupaten yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	3	159.999.900	Penataan Organisasi	Jumlah Kelembagaan Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	26	159.999.900	-
4.01.01.2.13.Ind2		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan	1			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan	6		-
4.01.01.2.13.Ind3		Jumlah Perangkat Daerah yang telah menetapkan Standar Pelayanan Publik	10			Jumlah Perangkat Daerah yang telah menetapkan Standar Pelayanan Publik	15		-
4.01.01.2.13.Ind4		Jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Reformasi Birokrasi	8			Jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Reformasi Birokrasi	8		-

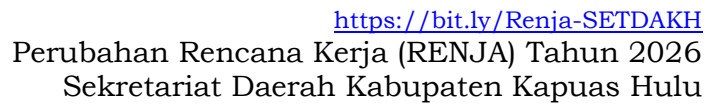


Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

TOTAL

TOTAL





➤ Terdapat beberapa perbedaan dari indikator dan target kinerja: indikator sebanyak 16 indikator yang mengalami perubahan dan sebanyak 53 target dari 121 target yang mengalami perubahan;

➤ Secara umum perubahan ke 16 indikator tersebut disebabkan:

- Telah dilakukan expose oleh Inkab terhadap hasil evaluasi AKIP Setda Kab. Kapuas Hulu Tahun 2025 ditemukan bahwa terdapat beberapa indikator sub kegiatan yang tidak sesuai dengan Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025, sehingga berdasarkan hasil temuan evaluasi tersebut maka wajib dilakukan penyesuaian. Dengan perubahan indikator tentu akan berdampak juga terhadap target kinerja juga, sehingga target kinerja juga mengalami perubahan;
- Berdasarkan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 bahwa salah satu yang menjadi catatan Kemenpan RB adalah Perjenjangan Kinerja/ Cascading yang disusun beberapa PD belum sepenuhnya mengacu pada Permenpan RB Nomor 89 tahun 2021, yaitu belum mempertimbangkan *Logical framework* dan *Critical success factor* (CSF) atas pencapaian kinerja, sehingga perjenjangan kinerja belum memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat, serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi dan isu strategis;
- Menindaklanjuti hal tersebut maka dalam menetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja mengacu pada pohon kinerja/ cascading yang disusun berdasarkan Permenpan RB Nomor 89 tahun 2021 yang berorientasi outcome dengan indikator kinerja yang *SMART* (*specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*);
- Atas dasar ini maka penyusunan sasaran kinerja dari level Kepala OPD, pejabat struktural sampai dengan sasaran kinerja level input atau staf pelaksana yang kemudian dipedomani dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). (sumber: [Link](#))



- Secara umum penyebab perubahan 53 target dari 121 target:
Analisis penentuan target berdasarkan trend capaian tahun-tahun sebelumnya serta hasil evaluasi baik evaluasi internal OPD maupun evaluasi dari pihak evaluator seperti Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu. Penentuan tren paling sedikit atau setidaknya 3 tahun terakhir data yang dapat menentukan proyeksi untuk 5 tahun kedepannya. Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tidak memiliki trend data untuk tahun 2022, 2023, 2024 dalam penentuan target renstra. Dari Tahun 2024 kebawah, Sekretariat Daerah tidak pernah melakukan pengukuran kinerja dengan berdasarkan bukti dukung, sehingga data realisasi yang ada tidak bisa divalidasi keabsahan datanya. Sehingga hanya data untuk tahun 2025 saja yang telah dilakukan validasi, namun belum terlalu secara mendalam dalam melakukan verifikasi bukti dukung. Dari permasalahan tersebut sehingga target kinerja yang telah ditentukan tidak sepenuhnya dapat menggambarkan kondisi kedepannya.
Selain dari tren 3 tahun sebelumnya, penentuan target untuk tahun 2026 juga didasarkan atas hasil evaluasi internal yang dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk memantau dan memastikan kinerja dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dari hasil evaluasi internal tersebut maka dipandang perlu melakukan perubahan terhadap target kinerja agar target kinerja tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
- Target anggaran mengalami penurunan dari anggaran yang terdapat pada dokumen Renstra, hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran pada Tahun 2026 sehingga kemungkinan efisiensi masih sampai dengan tahun 2027
- Dengan adanya penurunan anggaran, tentu nantinya akan berdampak terjadinya penurunan target kinerja pada kondisi indikator tertentu terutama belanja fisik dan modal.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 menggariskan Visi "**Indonesia Emas 2045**", yaitu mewujudkan "Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan," dengan target menjadi negara maju berpendapatan tinggi, salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia, dan mewujudkan kesejahteraan merata sebelum usia kemerdekaan ke-100, dengan fokus pada transformasi sosial, ekonomi, SDM berkualitas, supremasi hukum, dan ketahanan lingkungan melalui 8 Agenda Pembangunan

3.2 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

Adapun prioritas Pembangunan pada Tahun 2026 yaitu "**Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Produktif**" dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah "**Terwujudnya Kapuas Hulu SEMAKIN HEBAT**" (**Semakin Harmonis, Semakin Energik, Semakin Berdaya Saing, Semakin Amanah dan Semakin Terampil**). Visi tersebut mengandung lima elemen utama pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Harmonis, Energik, Berdaya saing, Amanah, dan Terampil sebagaimana dijabarkan pada penjelasan di bawah ini:

1. **Semakin Harmonis:** Mengedepankan nilai etika, moral, dan norma dalam masyarakat



2. **Semakin Energik:** meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan Kesehatan, Pembangunan keolahragaan, dan pendapatan per kapita
3. **Semakin Berdaya saing:** mewujudkan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan yang lebih baik, didukung SDM yang unggul.
4. **Semakin Amanah:** mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN
5. **Semakin Terampil:** Meningkatkan kualitas SDM yang handal, kreatif, inovatif, dan produktif

Dalam rangka mewujudkan **Visi** tersebut maka telah ditetapkan berbagai **Misi** Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kehidupan beragama, kebudayaan, sosial dan keamanan;
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang energik menuju masyarakat produktif, mandiri, partisipatif, berkeadilan serta ramah investasi dan ramah lingkungan;
3. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang sehat, berdaya saing, cerdas dan inovatif dengan meningkatkan kualitas pendidikan
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, berintegritas, tertib, transparan dan akuntabilitas;
5. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kapuas Hulu yang berkualitas dan terampil melalui pelatihan serta penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya.

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan untuk pencapaian visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sebab itu, tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja.



Adapun tujuan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kondusivitas wilayah dengan indikator Persentase Konflik sosial yang tertangani;
2. Meningkatkan nilai tambah ekonomi dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata dengan indikator PDRB Per Kapita
3. Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan indikator Nilai SAKIP
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

Untuk mencapai tujuan diatas harus ditentukan pula sasaran yang akan menunjang tercapainya tujuan tersebut. Sasaran merupakan perwujudan dari misi yang pencapaiannya diharapkan dalam kurun waktu satu tahunan dapat terlaksana. Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan 5 (lima) sasaran sebagai berikut:

Sasaran Pertama :

“Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat” dengan indikator sasaran adalah:

- Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan;
- Persentase kebijakan strategis dibidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan

Sasaran Kedua :

“Meningkatnya Kualitas Kebijakan diBidang Perekonomian dan SDA”, dengan indikator sasaran adalah: Persentase kebijakan strategis dibidang Perekonomian dan SDA yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan

Sasaran Ketiga :

“Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah”, dengan indikator sasaran adalah: Nilai SAKIP Sekretariat Daerah



Sasaran Keempat :

“Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Administrasi Umum”, dengan indikator sasaran adalah: Persentase kebijakan strategis dibidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan

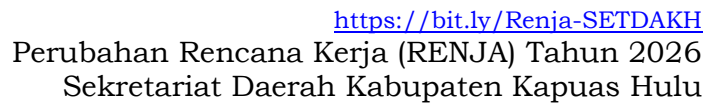
Sasaran Kelima :

“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah”, dengan indikator sasaran adalah: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah

Adapun Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2026 sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel 4 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2026	Satuan
1	Meningkatkan kondusivitas wilayah	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	96	%
			Persentase kebijakan strategis dibidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	95	%
2	Meningkatkan nilai tambah ekonomi dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata	Meningkatnya Kualitas Kebijakan diBidang Perekonomian dan SDA	Persentase kebijakan strategis dibidang Perekonomian dan SDA yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	100	%
3	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	70	Nilai
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Administrasi Umum	Persentase kebijakan strategis dibidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	100	%
4	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	85	Nilai



Pada Tahun 2026 ini pemerintah pusat secara besar-besaran melakukan efisiensi anggaran atau melakukan pemangkasan anggaran yang ditransfer ke daerah dengan pemotongan sekitar $\pm 60\%$ dari anggaran tahun 2025. Dasar efisiensi anggaran 2026 adalah peningkatan kualitas belanja negara agar lebih produktif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, yang diwujudkan melalui pengurangan anggaran belanja pada pos-pos yang dianggap kurang optimal, seperti ATK, perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial. Anggaran Tahun 2026 tetap diarahkan untuk program prioritas seperti ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga efisiensi tidak mengganggu program-program prioritas tersebut.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di tahun 2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan 3 program dan 19 Kegiatan dengan 77 Sub Kegiatan.

Tabel 5 Program dan Kegiatan dan Target Capaian Kinerja Renja

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Realisasi 2025	Satuan	2026	2027		Penanggung Jawab		
						Target	Rp	Target		Rp	
Sekretariat Daerah						42.910.501.800	101.223.519.405		-		
Meningkatkan kondusivitas wilayah	Meningkatkan kondusivitas wilayah									RPJMD	
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	100,00	%	96	8.697.285.080	97	51.050.124.144	SEKDA
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sasaran 1.ind2	Persentase kebijakan strategis dibidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	100,00	%	95	8.697.285.080	95	51.050.124.144	SEKDA	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan	19	Dok	21	8.697.285.080	19	51.050.124.144	Asisten 1	
		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase penyelesaian administrasi batas antar wilayah Kecamatan dan Kelurahan	69,44	%	100	222.236.400	69	620.933.900	TAPEM	
			Persentase Pemutakhiran Data Rupabumi	73,91	%	100		80			
			Persentase Jumlah Urusan pada OPD yang Menyusun LPPD sesuai petunjuk	100,00	%	100		100			
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintah	1	Dok	4	86.188.600	1	161.190.000	TAPEM	
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1	Dok	2	35.402.800	1	147.147.400	TAPEM	
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2	Dok	4	100.645.000	2	312.596.500	TAPEM	
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	11	Kebijakan	10	8.234.700.400	11	49.399.867.144	KESRA	
			Jumlah rumusan Kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial yang terlaksana	1	Kebijakan	1		1			
			Jumlah Rumusan Kebijakan Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang terlaksana	4	Kebijakan	0		4			
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	11	Dok	3	8.209.384.400	11	49.110.104.844	KESRA			
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian KinerjaTerkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Bimbingan	1	Dok	1	29.637.200	1	487.212.000	KESRA			



Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Realisasi 2025	Satuan	2026		2027		Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	
			Perempuandan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB							
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		4	Dok	2	25.316.000	4	289.762.300	KESRA
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase penyelesaian Proses Penyusunan produk hukum	105,09	%	83	118.084.280	85	874.106.100	HUKUM	
		Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum	84,62	%	80		85			
		Persentase Publikasi dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	90,67	%	100		100			
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	578	Dok	550	49.295.205	680	425.731.500	HUKUM	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	11	Kasus	10	40.260.000	10	290.351.000	HUKUM	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	136	Produk Huk	150	28.529.075	150	158.023.600	HUKUM	
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Wajib Daerah	100,00	%	100	122.264.000	100	155.217.000	TAPEM	
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	15	Dok	4	122.264.000	7	155.217.000	TAPEM		
Meningkatkan nilai tambah ekonomi dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata	Meningkatkan nilai tambah ekonomi dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata									RPJMD
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan diBidang Perekonomian dan SDA	Meningkatnya Kualitas Kebijakan diBidang Perekonomian dan SDA	Persentase kebijakan strategis dibidang Perekonomian dan SDA yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	100,00	%	100	789.648.900	100	4.693.332.673	SEKDA
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Perekonomian, Pembangunan, SDA dan PBJ yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan	19	Dok	10	789.648.900	19	4.693.332.673	Asisten Ekbang
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase kebijakan perekonomian yang di tindaklanjuti	100,00	%	100	61.169.400	100	1.234.671.305	EKBANG SDA
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2	Lap	4	12.234.100	2	240.450.000	EKBANG SDA
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2	Lap	4	12.233.700	2	437.415.000	EKBANG SDA
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1	Lap	4	12.234.000	1	159.720.000	EKBANG SDA
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1	Dok	4	12.233.700	1	157.300.000	EKBANG SDA
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1	Dok	4	12.233.900	1	239.786.305	EKBANG SDA
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase kebijakan Administrasi Pembangunan yang di tindaklanjuti	100,00	%	100	36.749.500	100	567.139.838	EKBANG SDA
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Fasilitasi penyusunan program pembangunan	1	Dok	4	12.281.600	1	152.951.198	EKBANG SDA
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi ProgramPembangunan	1	Lap	4	12.234.000	1	195.546.960	EKBANG SDA
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	1	Lap	4	12.233.900	1	218.641.680	EKBANG SDA
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase capaian layanan pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan tender/seleksi dan e-purchasing	39,19	%	100	655.028.000	100	2.411.521.530	PBJ
			Jumlah Penerima Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik	223	Dokumen	4		210		
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	29	Laporan	2	401.315.800	70	1.679.801.618	PBJ
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	223	Dokumen	4	184.761.200	210	456.640.811	PBJ
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	50	Orang	60	68.951.000	70	275.079.101	PBJ
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang di tindaklanjuti	100,00	%	100	36.702.000	100	480.000.000	EKBANG SDA
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1	Lap	4	12.233.900	1	180.000.000	EKBANG SDA
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan, Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	1	Lap	4	12.234.000	1	180.000.000	EKBANG SDA
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air	1	Lap	4	12.234.100	1	120.000.000	EKBANG SDA
Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah										RPJMD



Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Realisasi 2025	Satuan	2026		2027		Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah		Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	67,5	Nilai	70		72,5		SEKDA
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Administrasi Umum		Persentase kebijakan strategis dibidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	100,0	%	100	33.423.567.820	100	45.480.062.588	
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah yang Prima	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima									RPJMD
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	85,9	Nilai	85	33.423.567.820	86	45.480.062.588	SEKDA
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan	33	Dok	35	33.423.567.820	30	45.480.062.588	Asisten Administrasi Umum
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, dokumen Penganggaran dan Laporan Kinerja yang sesuai dengan pedoman teknis	100,00	%	100	232.231.313	100	798.248.500	PERKEU
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dok	9	119.645.713	4	527.301.000	PERKEU
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	Dok	1	15.441.100	1	43.164.500	PERKEU
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	Dok	1	14.414.000	1	32.607.000	PERKEU
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1	Dok	1	15.639.700	1	32.784.000	PERKEU
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1	Dok	1	15.333.400	1	17.938.000	PERKEU
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	Lap	1	15.265.200	1	110.439.000	PERKEU
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	4	Lap	4	32.486.600	4	30.315.000	PERKEU
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Lap	1	4.005.600	1	3.700.000	PERKEU
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan sesuai Pedoman yang Berlaku	100,00	%	100	19.464.041.075	100	13.765.849.662	PERKEU
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Org/ Bln	3234	18.792.571.200	12	12.452.511.662	PERKEU
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	Dok	1	1.510.000	1	209.214.000	PERKEU
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1	Dok	1	303.292.475	1	796.720.000	PERKEU
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dok	12	32.565.500	12	30.333.000	PERKEU
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lap	1	9.947.900	1	45.527.000	PERKEU
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	1	Dok	1	300.000.000	1	191.844.000	PERKEU
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	4	Lap	4	16.314.000	4	32.862.000	PERKEU
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dok	1	7.840.000	1	6.838.000	PERKEU
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	100,00	%	95	326.459.652	95	552.976.000	UMUM
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dok	2	24.114.127	2	33.000.000	UMUM
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD yang dihasilkan	2	Dok	2	29.203.700	2	39.551.000	UMUM
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	1	45.713.100	1	62.059.500	UMUM
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	4	27.475.400	4	36.975.000	UMUM
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Daftar Barang Sekretariat Daerah yang dihasilkan	1	Laporan	1	199.953.325	1	381.390.500	UMUM
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang sesuai dengan pedoman berlaku	100,00	%	90	119.491.829	90	3.915.328.676	UMUM
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12	Kegiatan	44	10.796.000	12	120.400.000	UMUM
		Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	1	50.000.000	1	135.000.000	UMUM
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	12	Dok	12	24.999.329	12	3.376.368.676	UMUM
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	Dok	3	16.980.000	12	101.080.000	UMUM
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	Dok	12	14.516.500	12	17.350.000	UMUM
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang	2	2.200.000	10	165.130.000	UMUM



Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Realisasi 2025	Satuan	2026		2027		Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum yang terpenuhi	19,60	%	100	5.639.347.962	100	10.240.884.000	UMUM
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	49.800.400	1	145.000.000	UMUM
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Paket	1	1.365.900	1	284.400.000	UMUM
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	1	1.345.900	1	566.953.000	UMUM
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	125.000.000	1	215.000.000	UMUM
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1	25.963.262	1	205.680.000	UMUM
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30	Laporan	12	2.046.203.000	30	2.117.944.000	UMUM
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	265	Laporan	12	3.359.670.000	1500	6.533.152.000	UMUM
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dok.	1	29.999.500	1	172.755.000	UMUM
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terakomodir	7,22	%	100	24.321.889	100	551.400.000	UMUM
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10	Unit	1	22.999.789	1	520.000.000	UMUM
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang tersedia	38	Unit	1	1.322.100	650	31.400.000	UMUM
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100,00	%	100	3.657.096.000	100	3.827.565.000	UMUM
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1	696.000	5053	61.000.000	UMUM
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	2.680.000.000	12	2.161.000.000	UMUM
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	250.000.000	6	925.565.000	UMUM
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	726.400.000	12	680.000.000	UMUM
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100,00	%	100	1.154.991.600	100	2.518.273.750	UMUM
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34	Unit	39	480.000.000	50	1.299.975.000	UMUM
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	Laporan	12	374.991.600	11	693.048.750	UMUM
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	2	300.000.000	2	525.250.000	UMUM
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah	92,31	%	100	669.671.000	100	726.831.000	UMUM
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	Orang/ Bulan	28	207.831.000	12	207.831.000	UMUM
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0	Orang	2	61.740.000	7	119.000.000	UMUM
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	Orang/ Bulan	24	400.100.000	2	400.000.000	UMUM
		Penataan Organisasi	Jumlah Kelembagaan Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	1	PD	26	159.999.900	3	750.027.000	ORGANISASI
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan	1	Dok	6		1		
			Jumlah Perangkat Daerah yang telah menetapkan Standar Pelayanan Publik	6	PD	15		10		
			Jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Reformasi Birokrasi	8	PD	8		8		
			Jumlah Perangkat Daerah dengan Predikat AKIP Minimal B sesuai Hasil Evaluasi Tim APIP dari Perangkat Daerah yang dievaluasi	23	PD	25		24		
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Perangkat Daerah yang di Fasilitasi dalam Penataan Perangkat Daerah	1	PD	50	59.999.500	1	236.085.000	ORGANISASI
			Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	50	PD	50		50		
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah PD yang difasilitasi dalam Bidang Ketatalaksanaan	33	PD	27	50.000.000	30	238.442.000	ORGANISASI
			Jumlah Unit Pelayanan Publik yang dilakukan Fasilitasi	6	PD	20		10		
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah PD yang difasilitasi dalam Peningkatan SAKIP	50	PD	27	50.000.400	50	275.500.000	ORGANISASI
			Jumlah PD yang difasilitasi dalam Pelaksanaan RB	8	PD	8		8		
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Layanan Keprotokolanan Pimpinan	100,00	%	100	1.975.915.600	83	7.832.679.000	PROKOPIM
			Persentase Layanan Komunikasi Pimpinan	102,35	%	100		84		
			Persentase Pendokumentasian Tugas Pimpinan	101,15	%	100		88		
		Fasilitasi Keprotokolanan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolanan	110	Lap	4	1.705.120.500	116	3.474.749.000	PROKOPIM
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	87	Lap	4	65.640.600	90	923.114.000	PROKOPIM
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	88	Lap	4	205.154.500	86	3.434.816.000	PROKOPIM

Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Data-Kinerja-SetdaKH-2026>



BAB IV

PENUTUP

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja OPD yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka Sekretariat Daerah menyusun rancangan rencana kerja yang dituangkan dalam wujud dokumen Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2026, yang berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran, yakni mulai awal tahun hingga akhir tahun 2026. Dokumen ini menjelaskan perihal prioritas pembangunan yang akan menjadi fokus program tahun 2026 beserta sasaran, arah kebijakan dan berbagai indikasi kegiatan untuk mencapainya.

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2026 dan berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah tahun 2025-2029. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Selanjutnya Sekretaris Daerah selaku Kepala Sekretariat Daerah beserta segenap Kepala Bagian dan Staf akan melaksanakan program-program kegiatan sesuai dengan perencanaan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2026. Dalam kaitan itu, diharapkan kepada Bupati selaku Kepala Daerah serta Wakil Bupati Kapuas Hulu dapat memberikan dukungan sepenuhnya agar program-program yang telah disusun dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran sebagaimana yang dicita-citakan.

Selain itu, perlu adanya sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju serta disiplin dari semua pihak sehingga pada akhirnya nanti terwujud pelaksanaan program-program kegiatan yang sepenuhnya mampu memberikan manfaat dalam rangka mendukung Rencana Kerja



Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2026 untuk kesejahteraan masyarakat Kapuas Hulu yang adil dan merata.

Putussibau, 25 Mei 2026

Sekretaris Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,



Ambrosius Sadau





LAMPIRAN 1 Daftar Dokumen SAKIP Sekretariat Daerah

Untuk dapat membuka dokumen pada tabel dibawah ini silahkan klik link pada tulisan warna biru pada tabel, atau masuk melalui link:

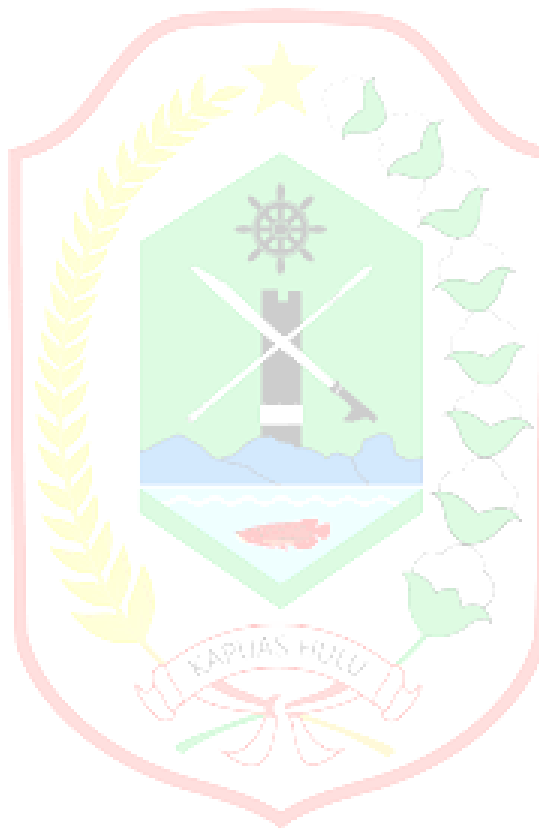
- <https://bit.ly/Daftar-Pustaka-Perencanaan-Setda-KabKH> atau pada link:
- <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bGKzftQLW69TNYyq-8NJ1OGg5xDvFYULTYR5px1oo0/edit?gid=1918065696#gid=1918065696>

No	Nama Dokumen	LINK							
1	Renstra	Penetapan 2025-29	Ranhir 25-29	Ranwal 2025-29	2021-25				
2	Renja	Perubahan 2027	Renja 2027	Ranwal 2027	Perubahan 2026	Revisi 2026	2026	Perubahan 2025	2025
3	Perjanjian Kinerja	Perubahan 2026	2026	Perubahan 2025	2025	2024	2023		
4	SKP	2026	2025						
5	Pohon Kinerja	2025-29							
6	Cascading Kinerja	Revisi 2025-29	2025-29	2021-25 Revisi II	2021-25 Revisi				
7	Crosscutting	Revisi 2025-29	2025-29	2021-25 Revisi	2021-25				
8	Rencana Aksi	Perubahan 2026	2026	Perubahan 2025	2025	2024			
9	RKA	2026	RKA Penyempurnaan 3 2025	RKAP 2025	2025	2024	2023		
10	DPA	2027	2026	2025	2024	2023			
11	DPPA Pergeseran/ Penyempurnaan	2027	2026	2025 (3)	2025 (2)	2025 (1)	2024		
12	DPPA	2026	2025	2024	2023				
13	IKU	2026	2025		2024	2023	2022		
14	IKI	2026	2025 Perubahan	2025	2024	2023			
15	SKP	2026	2025						
16	SOP Renja	Link							
17	SOP Pengumpulan & Pengukuran Data Kinerja	Link							
18	SOP Evaluasi Kinerja	Link							
19	Pengukuran Kinerja	Tr 4 2025	Tr 3 2025	Tr 2 2025	Tr 1 2025	Tr 1 2024	Tr 2 2024	Tr 3 2024	Tr 4 2024
20	Evaluasi Hasil Renja			Tw 4 2025					
21	Evaluasi Kinerja/ Monev	2028	2027	2026	2025	Tr 1 2024	Tr 2 2024	Tr 3 2024	Tr 4 2024
22	Laporan Kinerja/ LKjIP	2025	2024	2023	2022	2021			
23	LHE AKIP	2025	2024	2023	2022	2021			
24	TL LHE	2026	2025	2024	2023	2022			
25	RATL Evaluasi Internal	2026	2025						
26	Refocusing	2024	Pergeseran 2 2025	DPPA 2025					
27	SK Tim Renstra	2025-29							



No	Nama Dokumen	LINK							
28	SK Tim SAKIP	2024	2025						
29	Laporan Keuangan	2024							
30	Laporan Hasil Evaluasi Renstra	2021-25	2025-29						
31	Penilaian Mandiri	2026	2025	2024					
32	Analisis Perubahan IKU	2025-2029							
33	Tanggapan Perubahan Indikator Sub Kegiatan 2025-29	2025							

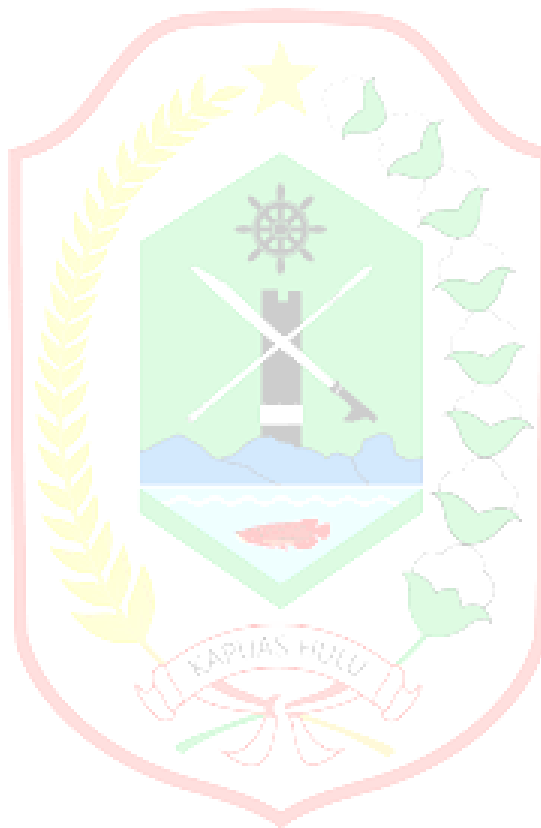
Sumber: <https://bit.ly/Daftar-Pustaka-Perencanaan-Setda-KabKH>





LAMPIRAN 2 Evaluasi Hasil Renja Tahun 2026 Triwulan I

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AEmSX8GtZlr4Psc5KXxjNd0lt-W2edNWu7ET8IURHsU/edit?gid=731406451#gid=731406451>





LAMPIRAN 3 Matrik Rencana Kerja Perangkat Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan Beserta

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan			Catatan Penting	Sesudah Perubahan	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
4.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN, URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				42.940.139.000	-	-	-	42.940.139.000
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan	Kapuas Hulu	19	8.726.922.280	-	-	21	8.726.922.280
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase penyelesaian administrasi batas antar wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Kapuas Hulu	68,00	222.236.400	-	-	100,00	222.236.400
4.01.02.2.01.ind2		Persentase Pemutakhiran Data Rupabumi	Kapuas Hulu	78,00			-	100,00	
4.01.02.2.01.ind3		Persentase Jumlah Urusan pada OPD yang Menyusun LPPD sesuai petunjuk	Kapuas Hulu	100,00			-	100,00	
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintah	Kapuas Hulu	1	86.188.600	1.2.01.08 [DANA UMUM] - Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4	86.188.600
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kapuas Hulu	1	35.402.800	1.2.01.08 [DANA UMUM] - Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2	35.402.800
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kapuas Hulu	2	100.645.000	1.2.01.08 [DANA UMUM] - Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4	100.645.000
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	Kapuas Hulu	11	8.264.337.600	-	-	10	8.264.337.600
4.01.02.2.02.ind2		Jumlah rumusan Kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial yang terlaksana	Kapuas Hulu	1			-	1	
4.01.02.2.02.ind3		Jumlah Rumusan Kebijakan Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang terlaksana	Kapuas Hulu	4			-	0	
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kapuas Hulu	11	8.209.384.400	2.2.01.08.02.0005 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	3	8.209.384.400



<https://bit.ly/Renja-SETDAKH>
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan			Catatan Penting	Sesudah Perubahan	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kapuas Hulu	1	29.637.200	2.1.01.20.01.0001 [DANA KHUSUS] - Opsen PKB	-	1	29.637.200
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kapuas Hulu	4	25.316.000	1.2.02.01 [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil	-	2	25.316.000
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase penyelesaian Proses Penyusunan produk hukum	Kapuas Hulu	83,00	118.084.280	-	-	83,00	118.084.280
4.01.02.2.03.Ind2		Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum	Kapuas Hulu	80,00			-	80,00	
4.01.02.2.03.Ind3		Persentase Publikasi dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	Kapuas Hulu	100,00			-	100,00	
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kapuas Hulu	650	49.295.205	1.2.02.01 [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil	-	550	49.295.205
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kapuas Hulu	10	40.260.000	1.2.02.01 [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil	-	10	40.260.000
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kapuas Hulu	150	28.529.075	1.2.02.01 [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil	-	150	28.529.075
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Wajib Daerah	Kapuas Hulu	100,00	122.264.000	-	-	100,00	122.264.000
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kapuas Hulu	10	122.264.000	1.2.01.08 [DANA UMUM] - Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4	122.264.000



<https://bit.ly/Renja-SETDAKH>
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan			Catatan Penting	Sesudah Perubahan	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Perekonomian, Pembangunan, SDA dan PBJ yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan	Kapuas Hulu	19,00	789.648.900	-	-	10,00	789.648.900
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase kebijakan perekonomian yang di tindaklanjuti	Kapuas Hulu	100,00	61.169.400	-	-	100,00	61.169.400
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kapuas Hulu	2	12.234.100	1.2.01.08 [DANA UMUM] - Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4	12.234.100
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kapuas Hulu	2	12.233.700	2.1.01.20.01.0001 [DANA KHUSUS] - Opsen PKB	-	4	12.233.700
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kapuas Hulu	1	12.234.000	2.1.01.20.01.0001 [DANA KHUSUS] - Opsen PKB	-	4	12.234.000
4.01.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Kapuas Hulu	1	12.233.700	2.1.01.20.01.0001 [DANA KHUSUS] - Opsen PKB	-	4	12.233.700
4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Kapuas Hulu	1	12.233.900	2.1.01.20.01.0001 [DANA KHUSUS] - Opsen PKB	-	4	12.233.900
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase kebijakan Administrasi Pembangunan yang di tindaklanjuti	Kapuas Hulu	100,00	36.749.500	-	-	100,00	36.749.500
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Fasilitasi penyusunan program pembangunan	Kapuas Hulu	1	12.281.600	2.1.01.20.01.0001 [DANA KHUSUS] - Opsen PKB	-	4	12.281.600
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kapuas Hulu	1	12.234.000	2.1.01.20.01.0001 [DANA KHUSUS] - Opsen PKB	-	4	12.234.000
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	Kapuas Hulu	1	12.233.900	2.1.01.20.01.0001 [DANA KHUSUS] - Opsen PKB	-	4	12.233.900



<https://bit.ly/Renja-SETDAKH>
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan			Catatan Penting	Sesudah Perubahan	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase capaian layanan pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan tender/seleksi dan e-purchasing	Kapuas Hulu	100,00	655.028.000	2.1.01.20.01.0001 [DANA KHUSUS] - Opsen PKB	-	100,00	655.028.000
4.01.03.2.03.ind2		Jumlah Penerima Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik	Kapuas Hulu	210			-	4	
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kapuas Hulu	65	401.315.800	2.1.01.20.01.0001 [DANA KHUSUS] - Opsen PKB	-	2	401.315.800
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kapuas Hulu	210	184.761.200	2.1.01.20.01.0001 [DANA KHUSUS] - Opsen PKB	-	4	184.761.200
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kapuas Hulu	65	68.951.000	2.1.01.20.01.0001 [DANA KHUSUS] - Opsen PKB	-	60	68.951.000
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang di tindaklanjuti	Kapuas Hulu	100,00	36.702.000	-	-	100,00	36.702.000
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Kehutanan, Perikanan	Kapuas Hulu	1	12.233.900	2.1.01.20.01.0001 [DANA KHUSUS] - Opsen PKB	-	4	12.233.900
4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan, Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	Kapuas Hulu	1	12.234.000	2.1.01.20.01.0001 [DANA KHUSUS] - Opsen PKB	-	4	12.234.000
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air	Kapuas Hulu	1	12.234.100	2.1.01.20.01.0001 [DANA KHUSUS] - Opsen PKB	-	4	12.234.100
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan	Kapuas Hulu	30	33.423.567.820	-	-	35	33.423.567.820
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, dokumen Penganggaran dan Laporan Kinerja yang sesuai dengan pedoman teknis	Kapuas Hulu	100,00	232.231.313	-	-	100,00	232.231.313
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapuas Hulu	4	119.645.713	1.2.01.08 [DANA UMUM] - Dana Alokasi Umum (DAU)	-	9	119.645.713
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kapuas Hulu	1	15.441.100	2.1.01.20.01.0001 [DANA KHUSUS] - Opsen PKB	-	1	15.441.100



<https://bit.ly/Renja-SETDAKH>
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan			Catatan Penting	Sesudah Perubahan	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kapuas Hulu	1	14.414.000	2.1.01.20.01.0001 [DANA KHUSUS] - Opsen PKB	-	1	14.414.000
4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Kapuas Hulu	1	15.639.700	2.1.01.20.01.0001 [DANA KHUSUS] - Opsen PKB	-	1	15.639.700
4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Kapuas Hulu	1	15.333.400	2.1.01.20.01.0001 [DANA KHUSUS] - Opsen PKB	-	1	15.333.400
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kapuas Hulu	1	15.265.200	2.1.01.20.01.0001 [DANA KHUSUS] - Opsen PKB	-	1	15.265.200
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	Kapuas Hulu	4	32.486.600	2.1.01.20.01.0001 [DANA KHUSUS] - Opsen PKB	-	4	32.486.600
4.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	Kapuas Hulu	1	4.005.600	1.1.02 [DANA UMUM] - Retribusi Daerah - LRA	-	1	4.005.600
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan sesuai Pedoman yang Berlaku	Kapuas Hulu	100,00	19.464.041.075	-	-	100,00	19.464.041.075
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kapuas Hulu	12	18.792.571.200	1.2.01.08 [DANA UMUM] - Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3234	18.792.571.200
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kapuas Hulu	1	1.510.000	2.1.01.20.01.0001 [DANA KHUSUS] - Opsen PKB	-	1	1.510.000
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kapuas Hulu	1	303.292.475	2.1.01.20.01.0001 [DANA KHUSUS] - Opsen PKB	-	1	303.292.475
4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kapuas Hulu	12	32.565.500	2.1.01.20.01.0001 [DANA KHUSUS] - Opsen PKB	-	12	32.565.500
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kapuas Hulu	1	9.947.900	2.1.01.20.01.0001 [DANA KHUSUS] - Opsen PKB	-	1	9.947.900
4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Kapuas Hulu	1	300.000.000	1.2.01.08 [DANA UMUM] - Dana	-	1	300.000.000



<https://bit.ly/Renja-SETDAKH>
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan			Catatan Penting	Sesudah Perubahan	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
						Alokasi Umum (DAU)			
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kapuas Hulu	4	16.314.000	1.2.01.08 [DANA UMUM] - Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4	16.314.000
4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kapuas Hulu	1	7.840.000	1.2.01.08 [DANA UMUM] - Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1	7.840.000
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	Kapuas Hulu	95,00	326.459.652	-	-	95,00	326.459.652
4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kapuas Hulu	2	24.114.127	1.1.01 [DANA UMUM] - Pajak Daerah	-	2	24.114.127
4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD yang dihasilkan	Kapuas Hulu	2	29.203.700	1.1.01 [DANA UMUM] - Pajak Daerah	-	2	29.203.700
4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kapuas Hulu	1	45.713.100	1.1.01 [DANA UMUM] - Pajak Daerah	-	1	45.713.100
4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kapuas Hulu	4	27.475.400	1.1.01 [DANA UMUM] - Pajak Daerah	-	4	27.475.400
4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Daftar Barang Sekretariat Daerah yang dihasilkan	Kapuas Hulu	1	199.953.325	1.1.01 [DANA UMUM] - Pajak Daerah	-	1	199.953.325
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang sesuai dengan pedoman berlaku	Kapuas Hulu	90,00	119.491.829	-	-	90,00	119.491.829
4.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kapuas Hulu	12	10.796.000	1.2.01.08 [DANA UMUM] - Dana Alokasi Umum (DAU)	-	44	10.796.000
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kapuas Hulu	1	50.000.000	1.2.01.08 [DANA UMUM] - Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1	50.000.000



Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan			Catatan Penting	Sesudah Perubahan	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Kapuas Hulu	12	24.999.329	1.1.01 [DANA UMUM] - Pajak Daerah	-	12	24.999.329
4.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kapuas Hulu	12	16.980.000	1.1.02 [DANA UMUM] - Retribusi Daerah - LRA	-	3	16.980.000
4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kapuas Hulu	12	14.516.500	1.2.01.07 [DANA UMUM] - Dana Bagi Hasil (DBH)	-	12	14.516.500
4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kapuas Hulu	10	2.200.000	1.2.01.07 [DANA UMUM] - Dana Bagi Hasil (DBH)	-	2	2.200.000
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum yang terpenuhi	Kapuas Hulu	100,00	5.639.347.962	-	-	100,00	5.639.347.962
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kapuas Hulu	1	49.800.400	1.2.01.07 [DANA UMUM] - Dana Bagi Hasil (DBH)	-	1	49.800.400
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kapuas Hulu	1	1.365.900	1.2.01.07 [DANA UMUM] - Dana Bagi Hasil (DBH)	-	1	1.365.900
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kapuas Hulu	1	1.345.900	1.2.01.07 [DANA UMUM] - Dana Bagi Hasil (DBH)	-	1	1.345.900
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kapuas Hulu	1	125.000.000	1.2.01.07 [DANA UMUM] - Dana Bagi Hasil (DBH)	-	1	125.000.000
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kapuas Hulu	1	25.963.262	1.2.01.08 [DANA UMUM] - Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1	25.963.262
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kapuas Hulu	30	2.046.203.000	1.2.01.07 [DANA UMUM] - Dana Bagi Hasil (DBH)	-	12	2.046.203.000
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapuas Hulu	1500	3.359.670.000	1.2.01.07 [DANA UMUM] - Dana Bagi Hasil (DBH)	-	12	3.359.670.000



<https://bit.ly/Renja-SETDAKH>
 Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan			Catatan Penting	Sesudah Perubahan	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapuas Hulu	1	29.999.500	1.2.01.07 [DANA UMUM] - Dana Bagi Hasil (DBH)	-	1	29.999.500
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terakomodir	Kapuas Hulu	100,00	24.321.889	-	-	100,00	24.321.889
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kapuas Hulu	1	22.999.789	1.2.01.07 [DANA UMUM] - Dana Bagi Hasil (DBH)	-	1	22.999.789
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang tersedia	Kapuas Hulu	650	1.322.100	1.2.01.07 [DANA UMUM] - Dana Bagi Hasil (DBH)	-	1	1.322.100
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Kapuas Hulu	100,00	3.657.096.000	-	-	100,00	3.657.096.000
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kapuas Hulu	5053	696.000	1.1.02 [DANA UMUM] - Retribusi Daerah - LRA	-	1	696.000
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kapuas Hulu	12	2.680.000.000	1.2.01.07 [DANA UMUM] - Dana Bagi Hasil (DBH)	-	12	2.680.000.000
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kapuas Hulu	6	250.000.000	1.2.01.07 [DANA UMUM] - Dana Bagi Hasil (DBH)	-	12	250.000.000
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kapuas Hulu	12	726.400.000	1.2.01.07 [DANA UMUM] - Dana Bagi Hasil (DBH)	-	12	726.400.000
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Kapuas Hulu	100,00	1.154.991.600	-	-	100,00	1.154.991.600
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kapuas Hulu	39	480.000.000	1.2.01.07 [DANA UMUM] - Dana Bagi Hasil (DBH)	-	39	480.000.000
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kapuas Hulu	11	374.991.600	1.2.01.07 [DANA UMUM] - Dana Bagi Hasil (DBH)	-	12	374.991.600
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kapuas Hulu	2	300.000.000	1.2.01.07 [DANA UMUM] - Dana Bagi Hasil (DBH)	-	2	300.000.000



<https://bit.ly/Renja-SETDAKH>
 Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan			Catatan Penting	Sesudah Perubahan	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah	Kapuas Hulu	100,00	669.671.000	-	-	100,00	669.671.000
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kapuas Hulu	12	207.831.000	1.2.01.08 [DANA UMUM] - Dana Alokasi Umum (DAU)	-	28	207.831.000
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kapuas Hulu	7	61.740.000	1.2.02.01 [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil	-	2	61.740.000
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kapuas Hulu	2	400.100.000	1.1.01 [DANA UMUM] - Pajak Daerah	-	24	400.100.000
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Kelembagaan Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	Kapuas Hulu	3	159.999.900	-	-	26	159.999.900
4.01.01.2.13.Ind2		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan	Kapuas Hulu	1			-	6	
4.01.01.2.13.Ind3		Jumlah Perangkat Daerah yang telah menetapkan Standar Pelayanan Publik	Kapuas Hulu	10			-	15	
4.01.01.2.13.Ind4		Jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Reformasi Birokrasi	Kapuas Hulu	8			-	8	
4.01.01.2.13.Ind5		Jumlah Perangkat Daerah dengan Predikat AKIP Minimal B sesuai Hasil Evaluasi Tim APIP dari Perangkat Daerah yang dievaluasi	Kapuas Hulu	23			-	25	
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Perangkat Daerah yang di Fasilitasi dalam Penataan Perangkat Daerah	Kapuas Hulu	1	59.999.500	1.2.02.01 [DANA UMUM] - Pendapatan Bagi Hasil	-	50	59.999.500
4.01.01.2.13.0001.Ind2		Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Kapuas Hulu	50			-	50	
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah PD yang difasilitasi dalam Bidang Ketatalaksanaan	Kapuas Hulu	27	50.000.000	1.2.01.08 [DANA UMUM] - Dana Alokasi Umum (DAU)	-	27	50.000.000



<https://bit.ly/Renja-SETDAKH>
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan			Catatan Penting	Sesudah Perubahan	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
4.01.01.2.13.0002.ind2		Jumlah Unit Pelayanan Publik yang dilakukan Fasilitasi	Kapuas Hulu	10			-	20	
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah PD yang difasilitasi dalam Peningkatan SAKIP	Kapuas Hulu	50	50.000.400	1.2.01.08 [DANA UMUM] - Dana Alokasi Umum (DAU)	-	27	50.000.400
4.01.01.2.13.0003.ind2		Jumlah PD yang difasilitasi dalam Pelaksanaan RB	Kapuas Hulu	8			-	8	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Layanan Keprotokolan Pimpinan	Kapuas Hulu	82,00	1.975.915.600	-	-	100,00	1.975.915.600
4.01.01.2.14.Ind2		Persentase Layanan Komunikasi Pimpinan	Kapuas Hulu	83,00			-	100,00	
4.01.01.2.14.Ind3		Persentase Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kapuas Hulu	87,00			-	100,00	
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kapuas Hulu	112	1.705.120.500	1.2.01.08 [DANA UMUM] - Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4	1.705.120.500
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kapuas Hulu	87	65.640.600	1.2.01.08 [DANA UMUM] - Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4	65.640.600
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kapuas Hulu	82	205.154.500	1.2.01.08 [DANA UMUM] - Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4	205.154.500